

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan Taufik dan Hidayah-nya jualah kami telah berhasil menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2022 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

LPPD ini dimaksudkan sebagai bahan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.

LKPj ini dimaksudkan sebagai bahan masukan untuk pembuatan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

LPPD dan LKPJ ini memuat visi, misi prioritas dan sasaran pelaksanaan kegiatan, alokasi dan realisasi anggaran dari masing-masing kegiatan, hasil yang telah dicapai serta permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya.

Kami berharap, laporan ini dapat memberikan informasi yang diperlukan sekaligus juga sebagai bahan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program yang menjadi tugas pokok dan fungsi SKPD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan umumnya pada tahun-tahun berikutnya.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik dalam pelaksanaan program maupun dalam penyusunan laporan ini, untuk itu kami mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kebaikan dan kemajuan dalam pelaksanaan program kedepan, dan kepada semua pihak yang sudah membantu dalam penyusunan laporan ini diucapkan terima kasih.

Banjarbaru, Januari 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Selatan,

ENDRI, AP, M. AP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 19750821 199412 1 005

1 DAFTAR ISI

KATA PENGANTARi

DAFTAR ISIii

DAFTAR TABEL.....iii

BAB I CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH..... 1

 1.1 Capaian Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output) 1

 1.2 Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome) 3

 1.3 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan 3

 1.4 Kebijakan Strategis yang Dilaksanakan 8

 1.4.1 Isu Strategis Organisasi..... 8

 1.4.2 Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2022 11

BAB II **CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN**
(DEKONSENTRASI)..... [36](#)

 2.1 Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas Pembantuan..... 36

 2.2 Instansi Pemberi Tugas Pembantuan..... 36

 2.3 Realisasi Program dan Kegiatan Beserta Anggaran 37

 2.4 Permasalahan dan Kendala 39

 2.5Saran dan Tindak Lanjut 39

BAB III **CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL** [40](#)

 3.1 Standar Pelayanan Minimal 40

 3.2 Alokasi dan Realisasi Anggaran..... 40

 3.3 Dukungan Personil 44

 3.5Permasalahan dan Solusi..... 46

BAB IV **TINDAK LANJUT REKOMENDASI**
DPRD.....47

BAB V **PENUTUP**..... [48](#)

BAB VI **LAMPIRAN** [49](#)

2 DAFTAR TABEL

Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output) 1

Indikator Kinerja Kunci Hasil (OUTCOME)..... 3

Permasalahan Pelayanan SKPD dan Pendorong 10

Kondisi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Program dan Kegiatan 14

Indikator dan Target Capaian Kinerja 15

Indikator Kinerja Kinerja Daerah..... 15

Sasaran Strategis dan Indikator 16

Indikator, Kinerja, Target dan Realisasi 2021 & 2022 17

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat 17

Capaian Kinerja DPMPTSP 18

Indikator Kinerja Sesuai RPJMD dan Renstra 19

Rekapitulasi Indikator Kinerja Utama 26

Realisasi Belanja DEKON Tahun Anggaran 2022 37

Realisasi Belanja APBN (DAK) Tahun Anggaran 2022..... 38

Realisasi Anggaran DPMPTSP Tahun Anggaran 2022 40

Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan..... 44

Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan..... 45

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional 45

BAB I

I. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

1.1 Capaian Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)

Berdasarkan dari IKK Provinsi Permendagri No. 18 Tahun 2020 Tentang Indikator Kinerja Kunci keluaran (Output) Dinas Penanaman Modal dan Pleyanana Terpadu satu Pintu terdiri dari :

No	IKK OUTPUT	Jenis Data	Capaian Kinerja	Keterangan / Data Dukung yang dibutuhkan
Urusan Penanaman Modal				
1	Perda mengenai pemberian fasilitas / intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	- Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 tahun 2010 tentang tentang Fasilitas Penanaman Modal Di Provinsi Kalimantan Selatan - Peraturan daerah Kabupaten Tanah Bumbu nomor 4 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Investor - Peraturan daerah Kabupaten Tabalong nomor 4 tahun 2011 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modaldi Kabupaten Tabalong		Daftar terlampir
2	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas / insentif penanaman modal	✓ Draft SOP Insentif Kemudahan Pemberian Fasilitas/insentif	- draft	
3	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas / insentif penanaman modal	✓ Laporan Evaluasi Insentif/Kemudahan Berusaha	1 laporan	

No	IKK OUTPUT	Jenis Data	Capaian Kinerja	Keterangan / Data Dukung yang dibutuhkan
4	Kegiatan seminar bisnis, forum, <i>one on one meeting</i>	✓ Seminar Bisnis ✓ Forum Investasi ✓ One on one meeting investor dan UMKM	- 7 Kali - 1 Kali - 1 Kali	Daftar kegiatan terlampir
5	Kegiatan pameran penanaman modal	✓ Pameran INDOKRAF EXPO 2022 ✓ Pameran Promosi Investasi “Pekan Promosi & Investasi Daerah 2022” ✓ Pameran Yogya Craft Indo 2022 ✓ MTQ Nasional Kalsel Expo 12 ✓ Door To Door Promosi : ➤ PT. Hasnur Group	4 Kali	Daftar kegiatan terlampir
6	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	✓ Misi Perdagangan dengan Provinsi Jawa Timur ✓ Misi Perdagangan Dengan Kalimantan Timur ✓ Misi perdagangan dengan Mesir	3 Kali	Daftar kegiatan terlampir
7	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Tersedianya sarana dan prasarana konsultasi dan pegaduan ; terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal	✓ Secara tatap muka 857 kali ✓ Secara online 74 kali ✓ Secara chat Box 73 kali	Bukti terlampir
8	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Perizinan Penanaman modal digantikan dengan perizinan Berusaha: ✓ NIB ✓ Perizinan sesuai kewenangan provinsi	Jumlah Penerbitan : NIB: 5.389 Perizinan: 913 Izin	Data terlampir
9	Laporan realisasi penanaman modal	Tersedia pers rilis investasi Triwulan III tahun 2022 Total : Rp 10,66 T	1 laporan	Data terlampir

No	IKK OUTPUT	Jenis Data	Capaian Kinerja	Keterangan / Data Dukung yang dibutuhkan
10	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat provinsi serta kabupaten / kota	Terlaksananya Bimtek penanaman modal kepada aparatur dan penanaman modal di provinsi kalimantan selatan	8 Kali	Data terlampir
11	Pengawasan penanaman modal PMA dan PMDN	Terlaksananya pengawasan dan pelaksanaan penanaman Modal	37 Perusahaan	Bukti / Data terlampir
12	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan provinsi	Tersedia pada website, dan Simapan	2 media	Bukti terlampir

1.2 Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)

Indikator Kinerja Kunci keluaran (Outcome) terdiri dari :

Nomor	IKK OUTCOME	Jenis Data	Capaian Kinerja	Keterangan / Data Dukung yang dibutuhkan
1	Persentase peningkatan investasi di provinsi	Realisasi Investasi 2021 sebesar Rp5.23 T Realisasi Investasi 2022 Rp10.66T Persentase Peningkatan = 103.82 %	91.42%	FC Daftar rincian realisasi PMDN tahun 2021 dan 2022 pada ditandatangani oleh pejabat yang berwenang

1.3 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun Anggaran 2022 melaksanakan sebanyak 6 (enam) program pembangunan yang terdiri dari 1 (satu) program rutin (kesekretariatan) dan 5 (lima) program Urusan Penanaman Modal sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
3. Program Promosi Penanaman Modal;
4. Program Pelayanan Penanaman Modal;

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Adapun Program dan kegiatan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan untuk tahun anggaran 2022 telah dilaksanakan sesuai dengan program dan kegiatan seperti yang telah direncanakan. Namun untuk mengetahui sampai sejauh mana program dan kegiatan tersebut dilaksanakan perlu dilakukan evaluasi kinerja. Pada tahun anggaran 2022, DPMPTSP Prov.Kalsel melaksanakan 6 (enam) Program yang terdiri dari 13 (tiga belas) kegiatan serta 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan. Adapun Tingkat pencapaian program dan kegiatan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun anggaran 2022 sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan selama kurun waktu Tahun Anggaran 2022 sebesar 81.04% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (fisik) sebesar 100,00%, dengan sub. Kegiatan :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (fisik) 100,00%
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (fisik) 100,00%
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (fisik) sebesar 100,00% dengan sub. Kegiatan:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (fisik) 100,00%
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (fisik) 100,00%
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 100,00%
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar 100,00% dengan sub. Kegiatan:
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (fisik) 100,00%
 - Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan (fisik) 100,00%
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan (fisik) 0,00%
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah (fisik) sebesar 100,00% dengan sub. Kegiatan:

- Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (fisik) 100,00%
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (fisik) 100,00%
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor (fisik) 100,00%
 - Penyediaan Bahan Cetakan dan Pengadaan (fisik) 100,00%
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (fisik) 100,00%
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (fisik) 100,00%
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (fisik) sebesar 100% dengan sub. Kegiatan:
- Pengadaan Mebel (fisik) 100,00%
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (fisik) 100,00%
6. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (fisik) sebesar 100,00% dengan sub. Kegiatan:
- Penyedia Jasa Surat Menyurat (fisik) 100,00%
 - Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (fisik) 100,00%
 - Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor (fisik) 100,00%
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (fisik) sebesar 100,00% dengan sub. Kegiatan:
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (fisik) 100,00%
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (fisik) 100,00%
 - Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (fisik) 100,00%

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan selama kurun waktu Tahun Anggaran 2022 sebesar 75,64% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi (fisik) sebesar 100,00%, dengan sub kegiatan:
 - Penetapan Kebijakan Daerah Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (fisik) 100,00%
 - Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (fisik) 100,00%
2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi Provinsi (fisik) sebesar 100,00%, dengan sub kegiatan:
 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi (fisik) 100,00%
 - Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi (fisik) 100,00%

3. Program Promosi Penanaman Modal

Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan selama kurun waktu Tahun Anggaran 2022 sebesar 88,07% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi (fisik) sebesar 100,00%, dengan sub kegiatan:
 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Promosi (fisik) 100,00%
 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi (fisik) 100,00%.

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan selama kurun waktu Tahun Anggaran 2022 sebesar 80,72% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

1. Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Provinsi (fisik) sebesar 100,00%, dengan sub kegiatan:

- Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (fisik) 100,00%.
- Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (fisik) 100,00%.
- Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan (fisik) 100,00%.
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah (fisik) 100,00%.

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan selama kurun waktu Tahun Anggaran 2022 sebesar 67,09% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi (fisik) sebesar 100,00%, dengan sub kegiatan:
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal (fisik) 100,00%.
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (fisik) 100,00%.
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (fisik) 100,00%.

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan selama kurun waktu Tahun Anggaran 2021 sebesar 84,05% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- 1 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi(fisik) sebesar 100,00% , dengan sub. Kegiatan:
 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (fisik) 100,00%.

1.4 Kebijakan Strategis Yang Dilaksanakan

1.4.1 Isu Strategis Organisasi

Ditinjau dari tugas dan fungsinya, maka permasalahan yang masih menjadi tantangan dalam operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, terdiri dari unsur pelayanan dan investasi. Perlu dilakukan suatu analisis terhadap permasalahan-permasalahan serta isu-isu strategis.

Gambaran isu dan kondisi yang ada sebagai berikut:

- Kondisi perekonomian global, mengalami perlambatan ekonomi
- Dalam rangka Recovery Pemulihan Perekonomian akibat PANDEMI COVID-19
- Investasi di kalsel masih relative menarik dan potensial untuk dikembangkan
- Kalsel sebagai Gerbang Ibukota Negara
- Hilirisasi Industri
- Pelaksanaan Pelayanan Publik terkait Perizinan dan Nonperizinan

Adapun beberapa permasalahan umum yakni :

1. Peningkatan kinerja penanaman modal untuk menarik investor ke Kalimantan Selatan, melalui :
 - A. Analisis dan penelitian tentang kondisi dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi investor apabila ingin berinvestasi di Kalimantan Selatan
 - B. Mengkoordinasi permasalahan-permasalahan investasi diatas, untuk diclearkan, atau minimal dikurangi
 - C. Meningkatkan sinergi pemangku kepentingan dalam upaya peningkatan investasi di Kalimantan Selatan
 - D. Membuat rencana tindak peningkatan investasi di Kalimantan Selatan.
2. Peningkatan kinerja pelayanan untuk kemudahan perizinan dan kualitas yang lebih baik.

Melalui Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, perumusan isu strategis tersebut dilakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok serta fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas mengordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, sedangkan fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan antara lain adalah sebagai perumusan kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah yaitu melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang Perizinan dan Nonperizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, keamanan, dan kepastian dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya, dari tugas dan fungsi tersebut, maka permasalahan yang masih menjadi tantangan dalam operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) Belum seluruh daerah di Provinsi Kalimantan Selatan menyusun RUPM;
- 2) Masih sedikit identifikasi data potensi daerah;
- 3) Sinkronisasi perencanaan dan kebijakan penanaman modal;
- 4) Belum optimalnya promosi investasi;
- 5) Ketidakmerataan penanaman modal;
- 6) Masih kurangnya kesadaran perusahaan akan kewajibannya menyampaikan LKPM;
- 7) Data PMA/PMDN tidak sinkron antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 8) Menuju pelayanan prima;
- 9) Terbatasnya sumber daya manusia;
- 10) Sarana dan prasarana belum optimal;
- 11) Sistem informasi pelayanan belum optimal;
- 12) Keterbatasan Anggaran.

Tabel Permasalahan Pelayanan SKPD dan Pendorong

Permasalahan Pelayanan SKPD	Pendorong
- Belum optimalnya promosi investasi - Belum teridentifikasinya data potensi daerah - Ketidakmerataan penanaman modal - Pelayanan belum optimal - Masih kurangnya kesadaran perusahaan akan kewajibannya menyampaikan LKPM. - Data PMA/PMDN tidak sinkron antara pusat, provinsi dan kab/kota - Sinkronisasi Perencanaan - Belum seluruh daerah di Provinsi Kalimantan Selatan menyusun RUPM;	- Kejelasan visi jangka panjang Kalimantan Selatan - Ketersediaan lahan dan komoditi unggulan - Kondusifnya situasi sosial masyarakat dan keamanan - Wilayah bebas dan ancaman gempa bumi dan letusan gunung merapi - Kesiapan kelembagaan penanaman modal - Kesiapan aparatur pemerintah yang berkomitmen

Penentuan Isu-isu Strategis

Dari berbagai identifikasi masalah dan hasil telaahan diatas, maka isu strategis dalam penyelenggaraan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan lima tahun ke depan adalah:

1. Belum optimalnya investasi di Kalimantan Selatan; dan
2. Belum optimalnya pelayanan perizinan dan nonperizinan

1.4.2 Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2022

A. Rencana Strategis

Perumusan visi dan misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 merupakan salah satu tahap penting dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (clarity of direction) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi. Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

Bahwa Visi dan Misi setiap SKPD di lingkup Provinsi Kalimantan Selatan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholder. Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 adalah :

“KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA”

Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 :

- 2.1 Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur
- 2.2 Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata
- 2.3 Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian
- 2.4 Tata Kelola Pemerintahan yang lebih Fokus pada Pelayanan Publik
5. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana

Tujuan dan Sasaran SKPD

Dalam menentukan tujuan dan sasaran SKPD harus mengacu pada Visi dan Misi RPJMD. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dalam organisasi. Seluruh sumber daya dalam organisasi harus mempunyai kompetensi daya saing tinggi untuk mencapai tujuan.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh SKPD selama kurun waktu lima tahun ke depan, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, serta sebagai upaya mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan seperti yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026. Tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari setiap misi.

Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan sesuai RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026 mengacu pada Misi II dan Misi IV.

Adapun keterkaitan visi, misi, tujuan, dan sasaran digambarkan sebagai berikut:



Kondisi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Program dan Kegiatan

KONDISI AWAL DAN ISU	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM /KEGIATAN
<u>Kondisi</u> 1) Kondisi perekonomian global, berdampak pada harga komoditi ekspor kalsel, mengalami perlambatan ekonomi yaitu dari 5,35% (2013) menjadi 4,85% (2014), titik terendah pada 3,84% (2015 2.) Investasi di kalsel tahun 2014 mengalami penurunan, terutama di sektor tambang 3) Daya tarik investasi di sektor tersebut juga mengalami perlambatan <u>Isu</u> 1) Belum optimalnya investasi di Kalsel 2) Belum optimalnya pelayanan perizinan dan nonperizinan	<u>Tujuan</u> • Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi • Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan <u>Sasaran</u> • Meningkatnya Investasi yang Berdampak ke Daerah • Meningkatnya Pelayanan Publik <u>Strategi</u> • Pengembangan Iklim Penanaman Modal • Peningkatan Promosi Penanaman Modal • Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal • Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal • Peningkatan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	• Peningkatan Pemberian Fasilitas di Bidang Penanaman Modal • Peningkatan Promosi Penanaman Modal • Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal • Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal • Peningkatan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal :: a) Penetapan Pemberian Fasilitas /Intensif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi b) Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi 2. Program Promosi Penanaman Modal a) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Provinsi 3. Program Pelayanan Penanaman Modal b) Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal a) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 5. Program Pengelolaan Data dan Sistem informasi Penanaman Modal b) Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi

Sasaran RPJMD

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kalimantan Selatan nomor 2 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026, Sasaran utama penanaman modal yang ingin dicapai pada tahun 2026 yakni peningkatan investasi dan nilai IKM. kemudian ditetapkan 5 (lima) program prioritas urusan penanaman modal beserta Indikator dan targetnya sebagai berikut:

Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				Target	(Juta. Rp)	Target	(Juta. Rp)	Target	(Juta. Rp)	Target	(Juta. Rp)	Target	(Juta. Rp)	Target	(Juta. Rp)	
Urusan Penanaman Modal																
Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Rp	7.76 T	12.715 T	1.640	11.66 T	1.968	12.55T	2.362	13.52 T	2.834	14.55 T	3.401	15.67T	4.082	15.67T
Peningkatan Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Indeks	A (88.35)	A 88)	350	A (88.25)	1.500	A (88.50)	1.861	A (88.75)	1.952	A (89)	2.343	A (89.25)	2.821	A 89.25)

Selanjutnya ditetapkan juga indikator kinerja daerah pada urusan penanaman modal sebagai berikut:

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Target Capaian					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	
Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Triliun Rp	12.715	11.66	12.55	13.52	14.55	15.67	15.67

Target realisasi investasi PMA dan PMDN adalah sebesar Rp15.67 triliun. Selain itu juga ditargetkan indeks kepuasan masyarakat (IKM) dengan predikat A (nilai 89.25).

Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan ditentukan oleh seberapa jauh tingkat capaian dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran tersebut diklasifikasikan berdasarkan kategori capaian kinerja dengan rentang capaian sebagai berikut:

- Lebih dari 90% untuk kategori capaian Sangat Memuaskan;
- 80% s/d 90% untuk kategori capaian Memuaskan;
- 70% s/d 80% untuk kategori capaian Sangat Baik;
- 60% s/d 70% untuk kategori capaian Baik;
- Diatas 50% s/d 60% untuk ketegori capaian Cukup;
- Kurang dari 50% untuk kategori capaian Kurang;

Sasaran strategis dan indikator Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Selatan yang telah direncanakan adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis : • Meningkatnya Investasi yang Berdampak ke Daerah • Meningkatnya Pelayanan Publik	Peningkatan Investasi dengan indikator : 1. Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Rp)
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dengan indikator : 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Terdapat 1 (satu) sasaran strategis pada DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan dengan 2 (dua) indikator didalamnya, dimana salah satunya menjadi indikator kinerja daerah sesuai dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026.

Dalam perencanaan program kerja tahun 2022, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan secara keseluruhan telah menetapkan kelompok indikator kinerja kegiatan. Kelompok indikator input terdiri dari besarnya dana yang digunakan untuk membiayai suatu kegiatan dihitung dengan satuan rupiah. Sedangkan indikator output merupakan hasil yang langsung diperoleh ketika kegiatan selesai dilaksanakan, jenisnya bervariasi tergantung pada jenis kegiatannya.

Indikator outcome merupakan indikator yang terbentuk karena adanya output, yang bisa berupa pemanfaatan output yang dapat diukur dalam jangka pendek (intermediate outcome). Untuk menilai atau mengukur capaian kinerja, menggunakan tolok ukur indikator sasaran yang melekat pada kegiatan.

Kinerja Utama pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Peningkatan Investasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan 2 (dua) indikator yakni: Realisasi Investasi PMA dan PMDN dan Indeks kepuasan Masyarakat (IKM). Realisasi investasi PMA dan PMDN dengan capaian tahun 2022 91.42% masuk dalam klarifikasi Memuaskan. Sedangkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian 100.57%** juga masuk dalam klarifikasi sangat memuaskan.

Indikator Kinerja, Target, dan Realisasi 2021 & 2022

No	Indikator Kinerja	Target 2021 (sesuai RPJMD dan Renstra)	Realisasi 2021 dan % capaian	Target 2022 (sesuai RPJMD dan Renstra)	Realisasi 2022 dan % capaian
1	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	10.830.000.000.000	12.715.000.000.000 (117,41%)	11.660.000.000.000 TW. III	10.660.000.000.000 (91.42%)
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B (85)	A (89.25) 105.00%	A (88.25)	A (88.75) 100.57%

Penjelasan

Indikator indeks kepuasan masyarakat (IKM) tahun 2021 dengan nilai 89.25 dengan predikat A sesuai Permenpan RB nomor 14 Tahun 2017. Sedangkan Tahun 2022 dengan nilai A (88.25). Adapun unsur penilaian sebagai berikut:

➤ Persyaratan ➤ Prosedur ➤ Waktu pelayanan ➤ Biaya/tarif ➤ Produk Layanan	➤ Kompetensi Pelaksana ➤ Perilaku pelaksana ➤ Sarana dan prasarana ➤ Penanganan pengaduan dan masyarakat
---	---

Analisa capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dimana Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan 1 (satu) sasaran strategis dengan 2 (dua) kinerja utama dan 2 (dua) indikator dengan target yang akan dicapai setiap tahunnya. Untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja tersebut dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSentase CAPAIAN	CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA
1	Peningkatan Investasi	Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Rp)	11.660.000.000.000	10.660.000.000.000 (TW. III)	91.42%	Angka realisasi investasi yang terdiri dari PMA dan PMDN dijumlahkan dalam satuan Rupiah (Rp) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Adapun realisasi investasi didapat dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap perusahaan. LKPM dibuat setiap triwulan, sehingga dapat terlihat perkembangan realisasi pelaksanaan investasinya. TW. III	Dinas PM dan PTSP Prov Kalsel, BKPM RI
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A (88.25)	A (88.75)	100.57%	Analisis Survey Kepuasan Masyarakat	Dinas PM dan PTSP
Rata-rata Capaian					96.00%		

Penjelasan :

Pada Kinerja Peningkatan Investasi dengan indikator Realisasi Investasi PMA dan PMDN, tahun 2022 ditargetkan sebesar 11.66 triliun rupiah. Adapun realisasinya sebesar **10,66 triliun rupiah** sehingga capaian kinerja sebesar **91.42%**.

Rumus indikator realisasi investasi PMA dan PMDN yaitu Angka realisasi investasi yang terdiri dari PMA dan PMDN dijumlahkan dalam satuan Rupiah (Rp) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Adapun realisasi investasi didapat dari Laporan

Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap perusahaan. LKPM dibuat setiap triwulan, sehingga dapat terlihat perkembangan reliasasi pelaksanaan investasinya.

Pada Kinerja kedua yakni Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ditargetkan A dengan nilai 88.25. Adapun realisasinya adalah **A dengan nilai 88.75**, sehingga kinerja mencapai **100.57%**.

Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) dilakukan dengan melaksanakan analisis survey kepuasan masyarakat (SKM) dengan langkah sebagai berikut:

- Menyediakan kotak saran, ruang pengaduan dan kuesioner survey Kepuasan Masyarakat;
- Diselesaikannya aduan/keluhan masyarakat terkait pelayanan perizinan;
- Pembagian kuisisioner kepada pelanggan.

Indikator kinerja sesuai RPJMD dan Renstra

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	2021			2022			2023			2024			2025			2026		
		TARGET	REAL	CAPAIAN	TARGET	REAL	CAPAIAN	TARGET	REAL	CAPAIAN	TARGET	REAL	CAPAIAN	TARGET	REAL	CAPAIAN	TARGET	REAL	CAPAIAN
TARGET RPJMD KALSEL (RENSTRA DPMPTSP PROV. KALSEL):																			
Realisasi Investasi (Rp.Triliun)	7.76	10.83	12.71	117.41%	11.66	10.66	91.42%	12.55	-	-	13.52	-	-	14.55	-	-	15.67	-	-
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A (88.35)	B (85)	A (88)	TERCAPAI	A (88.25)	A (88.75)	TERCAPAI	A (88.50)	-	-	A (88.75)	-	-	A (89)	-	-	A (89.25)	-	-

Pada indikator Realisasi Investasi PMA dan PMDN tahun 2022 ditargetkan sebesar **11.66 triliun rupiah**. Adapun realisasinya sampai pada **Triwulan III** sebesar **10.66 triliun rupiah**, sehingga kinerja mencapai **91.42%**.

Pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ditargetkan A dengan nilai 88.25. Adapun realisasinya adalah A dengan nilai 88.75, sehingga kinerja mencapai 100.57%.

Indikator DPMPTSP (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 pada urusan penanaman modal yakni: Realisasi Investasi dengan target **15.67** triliun rupiah.

Capaian realisasi investasi pada tahun 2022 sebesar **10.66** triliun rupiah atau **91.42%** sampai pada **Triwulan III**. Realisasi investasi telah tercapai masuk kedalam klasifikasi sangat memuaskan dengan target yang telah ditetapkan. Disisi lain juga rencana investasi atau sering disebut juga dengan minat investasi (berdasarkan persetujuan/Izin prinsip/tanda daftar) mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan iklim investasi khususnya di Kalimantan Selatan semakin diminati dan bertumbuh kembang. Dengan kata lain Investor berminat untuk menanamkan modalnya di Kalimantan Selatan.

Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) dilakukan dengan melaksanakan analisis survey kepuasan masyarakat (SKM) dengan langkah sebagai berikut:

- Menyediakan kotak saran, ruang pengaduan dan kuesioner survey Kepuasan Masyarakat;
 - ✓ Melalui Tatap Muka
 - ✓ Melalui Chat BOX
 - ✓ Melalui SKM Online
- Diselesaikannya aduan/keluhan masyarakat terkait pelayanan perizinan;
- Pembagian kuesioner kepada pelanggan

Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Pada tahun 2022, target yang telah ditetapkan diperkirakan akan tercapai. Hal ini dikarenakan situasi yang sudah mulai normal pasca pandemic covid 19.

Upaya selanjutnya untuk pencapaian target **Realisasi** Investasi sebagai berikut :

1. Pengawasan Berkelanjutan kepada PMA & PMDN, didukung dengan APBD dan Dekonsentrasi APBN
2. Himbauan dan edaran pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
3. Fasilitasi kepada perusahaan yang bermasalah atau mengalami kesulitan baik dalam pelaksanaan usahanya sampai dengan pelaporan kegiatannya yang berupa LKPM
4. Selalu berkoordinasi dengan Pemerintah pusat (BKPM RI) dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui DPMPTSP Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan
5. Promosi Investasi yang berkelanjutan, antara lain : pameran investasi, forum investasi, one-one meeting, dan lainnya.
6. Matchmaking dalam rangka kemitraan dunia usaha.
7. Penyusunan dokumen, kajian, serta kebijakan untuk peningkatan investasi
8. Inovasi SEJADI (Seberkas Jadi Dua Izin), agar izin yang semula tidak masuk skema penanaman modal menjadi masuk dari bagian penghitungan investasi, sehingga dapat memacu peningkatan realisasi investasi.
9. Gerai pelayanan perizinan di daerah dalam rangka memudahkan masyarakat dalam hal pelayanan perizinan.
10. Perbaikan iklim investasi melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS).
11. Penyederhanaan perizinan (pengurangan waktu, syarat, dan prosedur)
12. Peningkatan Standar Pelayanan dengan implementasi SMM ISO 9001:2015.

Indikator Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 pada urusan penanaman modal yakni: Realisasi Investasi dengan target 11.66 triliun rupiah, sasaran RPJMD sama dengan capaian kinerja eselon II.

Capaian realisasi investasi pada tahun 2021 sebesar 12,71 triliun rupiah atau 117.47% dari target tahun 2021 sebesar 10.83 Trilyun. Realisasi investasi mengalami peningkatan.

Disisi lain, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan menunjukkan perbaikan. Hal ini dapat dilihat dari Indikator pengukur kepuasan masyarakat yakni Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2021 sebesar 89.25 dengan predikat A, sedangkan tahun 2022 A 88.25 sesuai Permenpan RB nomor 14 Tahun 2017.

Upaya yang dilakukan untuk peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan:

1. Penyesuaian persyaratan, spesifikasi, dan biaya/tarif yang mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.
2. Pendelegasian seluruh kewenangan perizinan dan nonperizinan lingkup pemerintah provinsi kepada DPMPTSP Prov.Kalsel sebanyak 18 bidang dan 145 jenis perizinan dan nonperizinan.
3. Pengelompokan prosedural pengurusan perizinan dan nonperizinan menjadi 3 (tiga) Standar Operasional Prosedur (SOP): 1. Dengan pertimbangan teknis tanpa peninjauan lapangan, 2. Tanpa pertimbangan teknis dengan peninjauan lapangan, dan 3. Tanpa pertimbangan teknis tanpa peninjauan lapangan. Prosedural yang dibuat adalah untuk kemudahan dan kenyamanan masyarakat dalam berurusan. Telah dilakukan pemangkasan proses untuk menciptakan kemudahan berusaha bagi masyarakat.
4. Konsistensi implementasi maklumat pelayanan yang menyatakan bahwa aparat menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik, dan apabila tidak ditepati, siap menerima sanksi yang berlaku.
5. Reward petugas pelayanan terbaik
6. Penyediaan dan Penambahan tenaga Front Officer
7. Tersedianya Help Desk
8. Implementasi perizinan secara online dengan Sistem Aplikasi Perizinan Online (SIMAPAN) dan Online Single Submission (OSS)
9. Digital Signature untuk percepatan dan kemudahan perizinan nonperizinan.
10. Pembentukan Satuan Petugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Provinsi Kalimantan Selatan serta keaktifan didalamnya
11. Implementasi ISO 9001:2015

Program dan Kegiatan Penunjang Kinerja

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta prioritas pembangunan, Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 yang mendukung pencapaian indikator kinerja daerah urusan penanaman modal adalah sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan:

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - b) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
 - c) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Pengadaan Barang Milik Daerah
 - a) Pengadaan Mebel
 - b) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c) Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Kantor

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- II. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan:
 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan daerah Provinsi
 - a) Penetapan Kebijakan Daerah Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Moda
 - b) Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
 - a) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi
 - b) Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi
- III. Program Promosi Penanaman Modal, dengan kegiatan dan Sub Kegiatan:
 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
 - a) Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
 - b) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
- IV. Program Pelayanan Penanaman Modal, dengan kegiatan dan Sub Kegiatan:
 - Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 - a) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 - b) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

- c) Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
 - d) Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
- V. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan kegiatan dan Sub Kegiatan:
- Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
 - a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - c) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
- VI. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, dengan kegiatan dan Sub Kegiatan:
- Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi
 - a) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Rekapitulasi penetapan indikator kinerja utama

NO	Nama Jabatan	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA
1	Kepala Dinas	Peningkatan Investasi	Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Rp)	11,66 Trilyun Rupiah	10,66 Trilyun Rupiah Data Triwulan III	91,42%	Angka realisasi investasi yang terdiri dari PMA dan PMDN dijumlahkan dalam satuan Rupiah (Rp) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Adapun realisasi investasi

NO	Nama Jabatan	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA
							didapat dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap perusahaan. LKPM dibuat setiap triwulan, sehingga dapat terlihat perkembangan reliasasi pelaksanaan investasinya. TRIWULAN III
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A (88.25)	A (88,75)	100,57%	Analisis Survey Kepuasan Masyarakat
2	Sekretaris	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	Nilai SAKIP DPMPTSP	A (83)	A 87.32	105,20%	Persentase Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Persentase Penyerapan Anggaran SKPD	85%	80,55%	94,76%	Persentase Kenaikan Nilai Komponen Pelaporan pada LKIP
			Persentase Aset yang tercatat	100%	100%	100,00%	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SOPD
		Meningkatnya Pelayanan Sarana Prasarana dan Administrasi Perkantoran Kepegawaian	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD	80%	80%	100,00%	Persentase pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian PNS SKPD Persentase Peserta Pelatihan/Bimtek yang paham
			Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian	100%	91,63%	91,63%	Persentase Aset yang tercatat (harus 100%) Persentase serapan anggaran SOPD

NO	Nama Jabatan	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA
		Peningkatan Kualitas SDM SKPD	Persentase Peserta Pelatihan/Bimtek yang paham	100%	100%	100,00%	Persentase Peserta Pelatihan/Bimtek yang paham
3	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian	Persentase Surat Menyurat, Surat Keluar dan Arsip yang dikelola	100%	91,63%	91,63%	Jumlah dokumentasi pelayanan surat menyurat
			Persentase Urusan Pemenuhan Rumah Tangga	100%	91,63%	91,63%	Jumlah Dokumen terkait administrasi kepegawaian
			Persentase Pemenuhan Bahan Analisa dan Evaluasi Organisasi dan Ketatalaksanaan	100%	100,00%	100,00%	Jumlah Pegawai yang Administrasi Kepegawaiannya dilayani secara tertib
			Persentase Pegawai yang Administrasi Kepegawaiannya dilayani secara Tertib	100%	100%	100,00%	Jumlah Pegawai yang Administrasi Kepegawaiannya dilayani secara tertib
		Tersedianya Sarana dan Prasarana sesuai Kebutuhan SKPD	Jumlah Dokumentasi Penyediaan Sarana dan Prasarana	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	Jumlah Peserta Pelatihan / Bimtek yang paham
		Tersedianya Dokumen Kebutuhan Diklat	Jumlah Dokumen Kebutuhan Diklat	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	Jumlah Dokumen Kebutuhan Diklat
4	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset	Tersedianya Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	Nilai Komponen Perencanaan pada LKIP DPMPTSP	28	28,94	103,36%	Nilai komponen pelaporan pada LKIP SKPD
			Nilai Komponen Pelaporan pada LKIP DPMPTSP	14	14,10	100,71%	Nilai komponen perencanaan pada LKIP SKPD
			Jumlah Dokumen Kinerja sesuai Ketentuan	6 Dokumen	6 Dokumen	100,00%	Jumlah dokumen kinerja sesuai ketentuan
		Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan secara berkala	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala
		Terlaksananya Pengelolaan Aset SKPD	Persentase Aset yang dikelola	100%	100%	100%	Jumlah Aset yang dikelola

NO	Nama Jabatan	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA
5	Kabid Perencanaan dan pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Realisasi pelaksanaan Kemitraan	100%	100%	100%	Jumlah Realisasi Pelaksanaan Kemitraan dibagi Jumlah Kemitraan Dunia Usaha x 100%
			Persentase Potensi Investasi dipromosikan	100%	100%	100%	Jumlah Potensi Investasi daerah yang dapat dipromosikan dibagi Jumlah Potensi Investasi di 13 Kab/Kota x 100%
			Persentase Potensi Investasi yang berbasis Lingkungan	25%	20%	100%	
		Pengembangan Perencanaan dan Deregulasi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Potensi Investasi Daerah yang teridentifikasi Berbasis Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Jumlah jenis Potensi Investasi Daerah yang teridentifikasi Berbasis Lingkungan
			Persentase Kesesuaian RUPM dengan Sektor Investasi	100% 8 Sektor	25% (2 Sektor)	25,00%	Jumlah Realisasi Sektor Investasi dibagi Jumlah sektor Investasi pada RUPM x 100%
		Pengembangan Pemberdayaan Usaha	Jumlah Kemitraan dunia usaha	4 Kemitraan	4 Kemitraan	100,00%	Jumlah Kemitraan dunia usaha
6	Kabid Promosi Penanaman Modal	Peningkatan Calon Investor	Persentase peningkatan Calon Investor	30% 4 Investor	30%	100,00%	Pertumbuhaa Calon Investor = (Jumlah calon investor tahun bejalan dikurang jumlah calon investor tahun lalu) dibagi jumlah calon investor tahun lalu x 100%
			Persentase promosi yang ditindaklanjuti	25% 5 Promosi	25%	100,00%	Promosi yang ditindaklanjuti dibagi jumlah romosl an dilaksanakan x 100%
		Peningkatan Pelaksanaan Promosi Investasi	Persentase Potensi Investasi daerah yang diminati	50% 10 Potensi	50% (10 Potensi)	100,00%	Jumlah Potensi Investasi Daerah yang

NO	Nama Jabatan	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA
							Diminati Jumlah Potensi yang dipromosikan x 00%
			Jumlah Pelaksanaan Promosi Investasi	3 Kali	3 Kali	100,00%	Jumlah Pelaksanaan Promosi Investasi
		Pengembangan Promosi Investasi	Jumlah Item Media Promosi Investasi	6 Item	6 item	100,00%	Jumlah item Media Promosi
			Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Seminar Bisnis, Forum, One-on-One Meeting	3 Kali	3 Kali	100,00%	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Seminar Bisnis, One on One Meeting
7	Kabid Pengendalian dan Informasi PM	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan yang Aktif dalam Investasinya	35%	35,70%	102,00%	Jumlah Perusahaan yang aktif (diawasi/diamati/diketahui) dibagi jumlah Perusahaan Penanaman Modal yang ada di Kalsel x 100%
			Persentase Permasalahan Perusahaan yang terselesaikan	100%	100%	100%	Jumlah penyelesaian permasalahan perusahaan dibagi jumlah permasalahan perusahaan x 100%
			Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai target	50%	55%		Jumlah Kabupaten/Kota yang Investasi Provinsi dibagi 13 Memenuhi Target Kabupaten/Kota x 100%
		Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan PM yang lancar melaksanakan kegiatannya (sesuai target investasi	300 Perusahaan	330 Perusahaan	110,00%	Jumlah Perusahaan Penanaman Modal PMA dan PMDN

NO	Nama Jabatan	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA
			perusahaan)				yang melaksanakan kegiatannya sesuai target Perusahaan
			Laporan Realisasi Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Laporan Realisasi Penanaman Modal
		Pembinaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang menyampaikan LKPM dengan valid tepat waktu	400 Perusahaan	410 Perusahaan	102,50%	Jumlah Perusahaan yang menyampaikan LKPM dengan valid dan tepat waktu
			Persentase Kabupaten/Kota yang telah mengimplementasikan Kebijakan penanaman Modal terbaru	100%	100%	100,00%	Jumlah Kabupaten/Kota yang Telah Mengimplemen- tasikan Kebijakan Penanaman Modal Terbaru dibagi 13 (Kabupaten/Kota) x 100%
8	Kabid Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	A (88.25)	A (88.50)	100,28%	Nilai IKM Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
			Persentase Permohonan yang dilayani	100%	100,00%	100,00%	Jumlah Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang dilayani dibagi Jumlah Perizinan yang dimohonkan masyarakat x 100%
			Persentase Usaha Berizin	90%			Jumlah Usaha Berizin dibagi jumlah usaha x 100%
		Pelayanan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	Persentase Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Non Perizinan Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam yang dapat diproses	100,00%	100,00%	100,00%	Jumlah Perizinan Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam yang dapat diproses sesuai standar dibagi Jumlah Perizinan yang

NO	Nama Jabatan	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA
							dimohonkan masyarakat x 100%
			Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam yang dilayani	40 Jenis Izin	40 Jenis Izin	100,00%	Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Nonperizinan Bidang Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam yang dilayani Jumlah Perizinan Bidang Ekonomi yang dapat diproses sesuai standar dibagi Jumlah Perizinan yang dimohonkan masyarakat x 100%
		Pelayanan Perizinan Bidang Ekonomi	Persentase Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ekonomi yang dapat diproses	100,00%	100,00%	100,00%	Jumlah Perizinan Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam yang dapat diproses sesuai standar dibagi Jumlah Perizinan yang dimohonkan masyarakat x 100%
			Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang LH dan SDA yang dilayani	50 Jenis Izin	50 Jenis Izin	100,00%	Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Nonperizinan Bidang Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam yang dilayani Jumlah Perizinan Bidang Ekonomi yang dapat diproses sesuai standar dibagi Jumlah Perizinan yang dimohonkan masyarakat x 100%

NO	Nama Jabatan	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA
9	Kabid Perizinan Infrastruktur dan Sosial	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Bidang Infrastruktur dan Sosial	Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur dan Sosial	A (88.25)	A (87.75)	99,43%	Nilai IKM Bidang Infrastruktur dan Sosial
			Persentase Permohonan yang dilayani	100%	100,00%	100,00%	Jumlah Perizinan Bidang Infrastruktur dan Sosial sesuai SOP dibagi Jumlah Perizinan yang dimohonkan masyarakat x 100%
			Persentase Usaha Berizin	90%			Jumlah Usaha Berizin dibagi jumlah usaha x 100%
		Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Sosial	Persentase Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Non Perizinan Bidang Sosial yang dapat diproses sesuai standar pelayanan	100%	100%	100,00%	Jumlah Perizinan Bidang Sosial yang dapat diproses sesuai standar dibagi Jumlah Perizinan yang dimohonkan masyarakat x 100%
			Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Sosial yang dilayani	20 Jenis Izin	20 Jenis Izin	100,00%	Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Nonperizinan Bidang Sosial yang dilayani
		Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Infrastruktur	Persentase Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur yang dapat diproses	100%	100%	100,00%	Jumlah Perizinan Bidang Infrastruktur yang dapat diproses sesuai standar dibagi Jumlah Perizinan yang

NO	Nama Jabatan	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA
			sesuai standar pelayanan				dimohonkan masyarakat x 100%
			Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur yang dilayani	35 Jenis Izin	35 Jenis Izin	100,00%	Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Nonperizinan Bidang Infrastruktur yang dilayani
10	Kabid Pengaduan, kebijakan dan Informasi	Pelayanan, Pengaduan, Kebijakan dan Informasi	Nilai IKM penanganan (pelayanan) Pengaduan	A (88.25)	A (88.25)	100,00%	Nilai IKM penanganan (pelayanan) Pengaduan
		Pelayanan Data dan Sistem Informasi	Jumlah Sistem Informasi yang Berjalan dengan Lancar dan Data Informasi yang Update	2 Sistem	2 Sistem	100,00%	Jumlah Sistem Informasi yang Berjalan dengan Lancar dan Data Informasi yang Update (terbaru)
		Pelayanan Pengaduan	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah pengaduan x 100%
			Persentase Pemenuhan pelayanan Investor	100%	100%	100%	Jumlah Pelayanan Investor dibagi Jumlah Permintaan Calon Investor x 100 %
			Persentase Pemenuhan Pelayanan Konsultasi	100%	100%	100%	Jumlah Pemenuhan Layanan Konsultasi dibagi Jumlah Konsultasi (dari Masyarakat/Pe mohon Ijin) x 100%

IV. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Pada anggaran tahun sebelumnya tidak ada rekomendasi yang harus ditindak lanjuti.

BAB II

II. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DEKONSENTRASI

2.1 Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

- ✓ Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Provinsi (Dekonsentrasi)
 - Peraturan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022.
 - DIPA Nomor : SP DIPA 065.01.3.159002/2023 Tanggal 30 November 2021
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Dalam Negeri
 - DIPA Nomor : SP DIPA 010.04.3.484172/2023 Tanggal 30 Nov 2021
- ✓ Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Provinsi DAK Fisik dan Non Fisik (APBN DAK)
 - Peraturan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pertunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022.

2.2 Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

- ✓ Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Provinsi (Dekonsentrasi)
 - Kementerian Investasi / BKPM RI
 - Kementerian Dalam Negeri
- ✓ Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Provinsi DAK Fisik dan Non Fisik (APBN DAK)
 - Kementerian Investasi / BKPM RI

2.3 Realisasi Program dan Kegiatan Beserta Anggaran :

✓ **Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Provinsi (Dekonsentrasi)**

- Program dan Kegiatan
- Program Penanaman Modal, Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV
- Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa, Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah.

Realisasi Belanja (Dekonsentrasi) instansi pada Semester II TA 2022 adalah sebesar :

- Kementerian Investasi BKPM dengan realisasi sebesar Rp 130.245.000,00 atau 55.57 persen dari anggaran belanja sebesar Rp 234.364.000,00 dengan realisasi fisik 81,66 persen
- Kementerian Dalam Negeri dengan realisasi sebesar Rp 221.423.000,00 atau 90.52 persen dari anggaran belanja sebesar Rp 256.798.000,00 dengan realisasi fisik 90,66 persen

Rincian anggaran dan realisasi belanja pada Semester II TA 2022 adalah sebagai berikut:

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022

URAIAN	Kementerian Investasi / BKPM			Kementerian Dalam Negeri		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Barang	234.364.000	130.245.000	55.57	256.798.000	221.423.000	90.52
Total Belanja Kotor	234.364.000	130.245.000	55.57	256.798.000	221.423.000	90.52
Pengembalian Belanja	0	0	0	0	0	0
Jumlah	234.364.000	130.245.000	55.57	256.798.000	221.423.000	90.52

Dana dekonsentrasi yang diturunkan BKPM RI kepada DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun Anggaran 2022 bertujuan untuk mengawasi perusahaan baik PMA maupun PMDN yang melaksanakan kegiatannya di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dengan target 1 Lembaga, adapun pelaksanaannya DPMPTSP dapat merealisasikan sebanyak 1 lembaga sehingga capaian kinerja sebesar 100,00%. Adapun capaian realisasi anggaran sebesar 55.57 persen ada beberapa perusahaan yang lokasinya berada di dekat lembaga tersebut.

✓ **Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Provinsi DAK Fisik dan Non Fisik (APBN DAK)**

- Jenis DK Non Fisik, Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Jenis DK Non Fisik, Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Jenis DK Non Fisik, Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Promosi

Realisasi Belanja APBN (DAK) Fisik dan Nonfisik instansi pada Semester II TA 2022 adalah sebesar :

- Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal dengan realisasi sebesar Rp 135.445.900,00 atau 58.87 persen dari anggaran belanja sebesar Rp 230.091.800,00 dengan realisasi fisik 246.67 persen
- Koordinasi dan Sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal dengan realisasi sebesar Rp 351.998.500,00 atau 77.15 persen dari anggaran belanja sebesar Rp 456.233.200,00 dengan realisasi fisik 100 persen
- Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Promosi dengan realisasi sebesar Rp 179.927.200,00 atau 89.96 persen dari anggaran belanja sebesar Rp 200.000.000,00 dengan realisasi fisik 100 persen.

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase %
Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	230.091.800	135.445.900	58.87
Koordinasi dan Sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	456.233.200	351.998.500	77.15
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Promosi	200.000.000	179.927.000	89.96

2.4 Permasalahan dan Kendala

- Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal
 - Adanya perbedaan Standar Biaya Umum (SBU) antara APBN dan APBD menyebabkan realisasi keuangan rendah dibandingkan realisasi fisik yang mana ditargetkan 15 kegiatan diantaranya 2 rapat dan 13 perjalanan dinas. Dimana realisasi fisik mencapai 246,67 % mengakibatkan banyak silpa.
 - Tidak adanya DAK Perubahan
- Koordinasi dan Sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal
 - Anggaran untuk PCR dan Zoom tidak terealisasi dikarenakan kegiatan rapat sudah tidak menggunakan PCR karena peserta rapat semua sudah melaksanakan vaksin COVID – 19 lengkap.
 - Perubahan pejabat perbendaharaan
- Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Promosi
 - Belum adanya project ready to offer (IPRO) untuk potensi yang akan ditawarkan
 - Minimnya anggaran Kab/Kota untuk menyiapkan anggaran kajian IPRO

2.5 Saran dan Tindak Lanjut :

- Menyiapkan anggaran untuk penyusunan kajian IPRO
- Melakukan sosialisasi LKPM di Kab/Kota agar pelaku usaha dapan dibantu dalam penginputan sehingga terpenuhinya target laporan LKPM

BAB III

CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 610/9803/Bangda tanggal 20 Desember 2017 tentang pelaporan capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dimana tidak terdapat SPM pada urusan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

3.2 Alokasi dan Realisasi Anggaran

3.3.1 Alokasi

Alokasi anggaran pada DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 sebesar Rp11.581.151.192 (100%) sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp9.348.638.509 (81.04%). Sedangkan realisasi fisik berupa output kegiatan sebesar 100%.

3.3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Belanja Langsung DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut :

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Anggaran	Bobot	Realisasi S/D Desember							
		Sub Output	Satuan Unit			Fisik		Keuangan		Pagu Realisasi		Satuan unit	
						S	R	S	R	S	R		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			11.581.151.192	74.47	100	100	100	81.04	11.581.151.192	9.384.638.509		
X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah			363.880.100	2.34	100	100	100	75.5	363.880.100	274.722.450		
X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kinerja sesuai ketentuan	3 Dokumen	178.612.600	1.15	100	100	100	67.2	178.612.600	120.031.100	3 Dokumen	
X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kinerja sesuai ketentuan	3 Dokumen	185.267.500	1.19	100	100	100	83.5	185.267.500	154.691.350	3 Dokumen	
X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.470.352.500	48.03	100	100	100	79.35	7.470.352.500	5.927.302.572		
X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya/terbayarnya Gaji dan Tunjangan	14 Bulan	7.231.086.700	46.5	100	100	100	79.65	7.231.086.700	5.759.271.972	14 Bulan	
X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 Bulan	226.981.300	1.46	100	100	100	68.82	226.981.300	156.218.000	12 Bulan	
X.XX.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersusunnya Pelaporan keuangan dan	1 Dokumen	12.284.500	0.08	100	100	100	96.16	12.284.500	11.812.600	1 Dokumen	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Anggaran	Bobot	Realisasi S/D Desember							
		Sub Output	Satuan Unit			Fisik		Keuangan		Pagu Realisasi		Satuan unit	
						S	R	S	R	S	R		
		Akutansi											
X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			91.040.000	0.59	100	100	100	38.89	91.040.000	35.406.200		
X.XX.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta Pelatihan / Bimtek yang paham	20 orang	34.591.000	0.22	100	100	100	57.23	34.591.000	19.796.200	20 orang	
X.XX.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Pelatihan / Bimtek yang paham	100 orang	21.408.000	0.14	100	100	100	70.81	21.408.000	15.160.000	100 orang	
X.XX.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta BimbinganTeknis	5 orang	35.041.000	0.23	100	100	100	1.28	35.041.000	450.000	5 orang	
X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.456.249.000	9.36	100	100	100	79.37	1.456.249.000	1.155.883.200		
X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan BangunanKantor	Tersedianya komponen instalasilistrik/pen erangan bangunankantor	12 Bulan	34.397.500	0.22	100	100	100	98.39	34.397.500	33.845.000	12 Bulan	
X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat tulis Kantor,	12 Bulan	86.993.600	0.56	100	100	100	99.18	86.993.600	86.277.000	12 Bulan	
X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya logistik kantor	12 Bulan	324.430.400	2.09	100	100	100	99.18	324.430.400	321.780.000	12 Bulan	
X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	55.998.500	0.36	100	100	100	100	55.998.500	55.997.900	12 Bulan	
X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan danperaturan perundang-undangan	12 Bulan	139.512.000	0.9	100	100	100	99.83	139.512.000	139.279.350	12 Bulan	
X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah yang dilaksanakan	12 Bulan	814.917.000	5.24	100	100	100	63.65	814.917.000	518.703.950	12 Bulan	
X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahDaerah			264.651.600	1.7	100	100	100	97.38	264.651.600	257.704.000		
X.XX.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah aset yang diadakan	38 Buah	82.000.000	0.53	100	100	100	99.84	82.000.000	81.868.000	38 Buah	
X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah aset yang diadakan	15 Unit	182.651.600	1.17	100	100	100	96.27	182.651.600	175.836.000	15 Unit	
X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.036.688.500	6.67	100	100	100	85.64	1.036.688.500	887.793.479		
X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 Bulan	15.935.000	0.1	100	100	100	95.14	15.935.000	15.160.900	12 Bulan	
X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Jasa Komunikasi Sumber daya air danlistrik	12 Bulan	498.000.000	3.2	100	100	100	82.72	498.000.000	411.931.729	12 Bulan	
X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Dokumen terkait jasa kebersihan dan keamanan kantor	12 Bulan	522.753.500	3.36	100	100	100	88.13	522.753.500	460.700.850	12 Bulan	
		Tersedianya makan dan minum Kantor	11 Bulan				0					11 Bulan	
X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			898.289.492	5.78	100	100	100	94.16	898.289.492	845.826.608		
X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak danPerizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Terlaksananya pemeliharaanankendaraan	12 Bulan	324.802.000	2.09	100	100	100	84.85	324.802.000	275.609.711	12 Bulan	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Anggaran	Bobot	Realisasi S/D Desember							
		Sub Output	Satuan Unit			Fisik		Keuangan		Pagu Realisasi		Satuan unit	
						S	R	S	R	S	R		
	Lapangan	dinas/operasional											
X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana pemeliharaan gedung kantor	12 Bulan	426.337.492	2.74	100	100	100	99.68	426.337.492	424.993.397	12 Bulan	
X.XX.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana pemeliharaan gedung kantor	12 Bulan	147.150.000	0.95	100	100	100	98.69	147.150.000	145.223.500	12 Bulan	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			456.375.900	2.93	100	100	100	75.64	456.375.900	345.182.150		
2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modalyang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			265.806.400	1.71	100	100	100	66.89	265.806.400	177.801.150		
2.18.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentifdan Kemudahan Penanaman Modal	Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal	1 Dokumen	229.504.100	1.48	100	100	100	63.85	229.504.100	146.538.750	1 Dokumen	
2.18.02.1.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Laporan Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal	1 Dokumen	36.302.300	0.23	100	100	100	86.12	36.302.300	31.262.400	1 Dokumen	
2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi			190.569.500	1.23	100	100	100	87.83	190.569.500	167.381.000		
2.18.02.1.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Persentase Kesesuaian RUPM dengan Sektor Investasi	8 Sektor	37.409.000	0.24	100	100	100	89.37	37.409.000	33.433.500	8 Sektor	
2.18.02.1.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah jenis Potensi Investasi Daerah yang teridentifikasi berbasis Lingkungan	3 Potensi	153.160.500	0.98	100	100	100	87.46	153.160.500	133.947.500	3 Potensi	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			963.141.600	6.19	100	100	100	88.07	963.141.600	848.221.100		
2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang MenjadiKewenangan Daerah Provinsi			963.141.600	6.19	100	100	100	88.07	963.141.600	848.221.100		
2.18.03.1.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Seminar Bisnis,Forum, One on One Meeting	3 Kali	424.832.000	2.73	100	100	100	83.05	424.832.000	352.820.050	3 Kali	
2.18.03.1.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Promosi Investasi	5 Kali	538.309.600	3.46	100	100	100	92.03	538.309.600	495.401.050	5 Kali	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			1.411.017.100	9.07	100	100	100	80.72	1.411.017.100	1.138.950.050		
2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			1.411.017.100	9.07	100	100	100	80.72	1.411.017.100	1.138.950.050		
2.18.04.1.02.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi SecaraElektronik	Forum Fasilitas Perusahaan	1 Kali	549.624.600	3.53	100	100	100	96.81	549.624.600	532.096.800	1 Kali	
2.18.04.1.02.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Fasilitasi Investor	3 Kali	18.423.800	0.12	100	100	100	45.84	18.423.800	8.445.000	3 Kali	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Anggaran	Bobot	Realisasi S/D Desember							
		Sub Output	Satuan Unit			Fisik		Keuangan		Pagu Realisasi		Satuan unit	
						S	R	S	R	S	R		
2.18.04.1.02.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan NonPerizinan	Survey dan tersusunnya Dokumen IKM	2 Dokumen	87.286.200	0.56	100	100	100	84.5	87.286.200	73.752.650	2 Dokumen	
2.18.04.1.02.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/InsentifDaerah	Pelaksanaan Rakor dan Sosialisasi	2 Kali	755.682.500	4.86	100	100	100	69.43	755.682.500	524.655.600	2 Kali	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			872.272.500	5.61	100	100	100	67.09	872.272.500	585.199.550		
2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang MenjadiKewenangan Daerah Provinsi			872.272.500	5.61	100	100	100	67.09	872.272.500	585.199.550		
2.18.05.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan PenanamanModal	Jumlah Perusahaan Penanaman Modal yang lancar melaksanakan kegiatannya (sesuai target investasiperusahaan)	400 Perusahaan	107.077.400	0.69	100	100	100	65.71	107.077.400	70.357.900	410 Perusahaan	
2.18.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan PenanamanModal	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat Provinsi serta Kabupaten /Kota	4 Kali	531.917.300	3.42	100	100	100	67.08	531.917.300	356.804.050	4 Kali	
2.18.05.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan PenanamanModal	Laporan Realisasi Penanaman Modal	1 Dokumen	233.277.800	1.5	100	100	100	67.75	233.277.800	158.037.600	1 Dokumen	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			268.242.800	1.72	100	100	100	84.05	268.242.800	225.455.950		
2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi			268.242.800	1.72	100	100	100	84.05	268.242.800	225.455.950		
2.18.06.1.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan PerizinanBerusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Data dan Informasi dan Non Perizinan provinsi 3 Media Waktu Pelaksanaan	3 Sistem	268.242.800	1.72	100	100	100	84.05	268.242.800	225.455.950	3 Sistem	
Total				15.552.201.092	100	100	100	100	80.55	15.552.201.092	12.527.647.309		

3.3 Dukungan Personil

Untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap susunan kepegawaian yang dimiliki DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan guna menunjang tugas dan fungsinya saat ini sebagai berikut :

Sumberdaya manusia pada DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan diklasifikasikan kedalam jenjang minimal SD atau Sekolah Dasar dan jenjang paling puncak yaitu jenjang Sarjana S2. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat di tabel.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah		Total	Ket
		L	P		
1	2	3	4	5	6
1	Sekolah Dasar (SD)	-	-	-	
2	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	-	-	-	
3	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	6	1	7	
4	Diploma Satu (D-I)	-	-	-	
5	Diploma Dua (D-II)	-	-	-	
6	Diploma Tiga (D-III)	2	2	4	
7	Diploma Empat (D-IV)	-	-	-	
8	Sarjana (S-1)	8	6	14	
9	Sarjana (S-2)	8	4	12	
10	Sarjana (S-3)	2	-	2	
	Jumlah PNS	26	13	39	
1	Sekolah Dasar (SD)	3	-	3	*)
2	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	2	-	2	*)
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	2	-	2	*)
4	Diploma III (D3)	-	2	2	*)
5	Sarjana (S-1)	12	11	23	*)
	Jumlah Non PNS	28	13	41	
	Jumlah Seluruh Karyawan DPMPTSP	54	26	80	

Keterangan : *) Pegawai Tenaga Kontrak

Dari jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang kemudian ditentukan komposisi pegawai berdasarkan pangkat golongan

sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah		Total	Ket
		L	P		
1	2	3	4	5	6
1	II/a Pengatur Muda	-	-	-	
2	II/b Pengatur Muda Tk.I	-	-	-	
3	II/c Pengatur	2	2	4	
4	II/d Pengatur Tk.I	5	-	5	
5	III/a Penata Muda	1	2	3	
6	III/b Penata Muda Tk.I	2	2	4	
7	III/c Penata	4	3	7	
8	III/d Penata Tk.I	5	4	9	
9	IV/a Pembina	2	-	2	
10	IV/b Pembina Tk.I	5	-	5	
11	IV/c Pembina Utama Tk.I	-	-	-	
12	IV/d Pembina Utama	-	-	-	
	JUMLAH	26	13	39	

Komposisi pegawai berdasarkan jabatan struktural dan fungsional untuk menentukan seberapa besar tanggung jawab yang diemban Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat dilihat pada tabel.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

No	Struktural dan Fungsional	Jumlah		Total
		L	P	
1	2	3	4	5
1	Eselon I	-	-	-
2	Eselon II.A	1	-	1
3	Eselon III.A	7	-	7
4	Eselon IV.A	2	-	2
5	Fungsional Tertentu	7	3	10
6	Non Struktural / Fungsional Umum	9	10	19
	Jumlah	26	13	39

3.4 Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

Tingginya satuan harga pada DPA yang merupakan implelementasi perpres 33 pada SIPD, sehingga anggaran belanja besar. Realisasi belanja relative rendah, tetapi realisasi fisik terpenuhi. Sehingga terdapat SILPA pada anggaran tahun 2022.

2. Solusi

Koordinasi dengan TAPD terkait pengalokasian anggaran. Kalimantan Selatan termasuk daerah yang relatif aman dan kondusif sebagai tempat berinvestasi sekalipun ada beberapa permasalahan yang memerlukan penyelesaian yang arif dan bijaksana.

BAB IV

IV. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD

Pada anggaran tahun sebelumnya tidak ada rekomendasi yang harus ditindak lanjuti.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Selatan sebagai instansi teknis yang melayani kegiatan Promosi, selalu berusaha untuk memanfaatkan sumber dana dan sarana yang ada dengan baik, dan berusaha melaksanakan tugas seoptimal mungkin dengan memperhatikan point-point yang dipaparkan sebelumnya, tingkat keberhasilan pencapaian pelaksanaan tugas DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan secara umum dapat dikatakan berhasil, karena target yang ada dapat dicapai dengan baik.

Penyusunan LKPJ LPPD DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 adalah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, artinya telah melaksanakan kinerja berdasarkan Rencana Strategik yang di dalamnya berisi sasaran-sasaran stratejik yang harus dipertanggung jawabkan. Sasaran stratejik tersebut merupakan gambaran tentang apa yang ingin dicapai oleh instansi pada tahun 2022 dan dituangkan dalam dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2022. Dengan demikian di dalam LKPJ LPPD Tahun 2022 ini DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan telah berusaha menjawab dan membuktikan bahwa amanah yang diberikan kepada instansi dapat dipertanggung jawabkan.

Dapat disimpulkan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 dengan 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu realisasi investasi dan indeks kepuasan masyarakat (IKM). Adapun capaian realisasi investasi Sebesar Rp 10.66 T, sedangkan capaian nilai IKM sebesar 100.57%. Dapat disimpulkan capaian kinerja DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan dengan klarifikasi sangat memuaskan.

3 LAMPIRA

N